



ANALISIS KUALITAS SOSIALISASI POLITIK TERHADAP AKSESIBILITAS TUNANETRA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 (STUDI KASUS KOMPLEK TUNA NETRA)

Akhmad Fakhri Dwi Saputra¹ Kun Budianto² Siti Anisyah³

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

fakhrids87@gmail.com ¹ kunbudianto_uin@radenfatah.ac.id ² sitianisyah_uin@radenfatah.ac.id ³

Abstract (English)

This study analyzes the quality of political socialization concerning the accessibility of blind voters in the 2024 Presidential and Legislative Elections at the Blind Community Complex, Ilir Timur III District, Palembang. The research is grounded in the principle of equal political rights guaranteed by the constitution and international conventions, yet in practice, blind voters still face significant barriers. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through field observations, in-depth interviews with blind voters and officials from the Palembang General Election Commission (KPU), as well as documentation and literature review. The findings reveal that KPU has conducted several socialization programs, including voting simulations, educational media, and instructional videos. These initiatives helped foster blind voters' confidence, but adaptive information distribution remained uneven. Major obstacles identified include limited availability of braille templates, which were only provided for presidential and DPD ballots, inadequate accessibility of polling stations for persons with disabilities, and suboptimal communication skills among election officers (KPPS). Furthermore, most blind voters received information informally through family, local leaders, or community groups, rather than directly from KPU. Disability organizations such as PERTUNI also played only a minor role in advocacy and political education. The study concludes that although KPU has demonstrated a commitment to inclusivity, the effectiveness of political socialization remains partial. Thus, sustained programs, improved accessibility facilities, and stronger multi-stakeholder collaboration are required to ensure truly inclusive and equitable elections for blind voters.

Article History

Submitted: 21 Agustus 2025

Accepted: 24 Agustus 2025

Published: 25 Agustus 2025

Key Words

Political Socialization, Accessibility, Blind Voters, 2024 Election, Palembang KPU

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini menganalisis kualitas sosialisasi politik terhadap aksesibilitas pemilih tunanetra pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Komplek Tunanetra Kecamatan Ilir Timur III Palembang. Latar belakang penelitian ini berangkat dari prinsip kesetaraan hak politik yang diamanatkan dalam konstitusi dan regulasi internasional, namun dalam praktiknya masih ditemukan hambatan akses bagi pemilih tunanetra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pemilih tunanetra dan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, serta dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan sejumlah program sosialisasi, antara lain simulasi pemungutan suara, penyediaan media edukatif, dan video panduan. Program ini efektif menumbuhkan rasa percaya diri pemilih tunanetra, namun distribusi informasi adaptif masih belum merata. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan penyediaan template braille yang hanya tersedia untuk surat suara Presiden dan DPD, aksesibilitas fisik menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum ramah disabilitas, serta keterampilan komunikasi petugas KPPS yang belum sepenuhnya optimal. Selain

Sejarah Artikel

Submitted: 21 Agustus 2025

Accepted: 24 Agustus 2025

Published: 25 Agustus 2025

Kata Kunci

Sosialisasi Politik, Aksesibilitas, Pemilih Tunanetra, Pemilu 2024, KPU Kota Palembang



itu, sosialisasi lebih banyak diterima melalui jalur informal seperti keluarga, Ketua RT, atau komunitas, bukan dari KPU secara langsung. Peran organisasi penyandang disabilitas seperti PERTUNI juga masih terbatas dalam mendukung advokasi dan edukasi politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun KPU telah menunjukkan komitmen inklusivitas, efektivitas sosialisasi politik masih parsial. Oleh karena itu, diperlukan kesinambungan program, peningkatan sarana aksesibilitas, serta penguatan kolaborasi multipihak untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas tunanetra.

PENDAHULUAN

Sejarah pemilu di Indonesia menunjukkan dinamika politik dan perkembangan demokrasi sejak kemerdekaan. Pemilu pertama kali digelar tahun 1955 pada masa Orde Lama untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Meskipun bersifat multipartai, penyelenggaraannya tetap terpusat sehingga ruang politik di daerah masih terbatas. Pada era Orde Baru, pemilu dilaksanakan rutin setiap lima tahun, tetapi sangat dikendalikan oleh pemerintah pusat. Partai politik dipersempit menjadi tiga—Golkar, PPP, dan PDI—serta pemilu lebih berfungsi sebagai formalitas kekuasaan. Saat itu, KPU belum independen karena seluruh proses berada di bawah kendali pemerintah.

Reformasi 1998 menjadi titik balik dengan hadirnya kebijakan desentralisasi melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini mendorong lahirnya pemilihan kepala daerah langsung, bertambahnya partai politik, serta penguatan KPU sebagai lembaga mandiri di tingkat nasional maupun daerah. Pemilu 1999 menandai transisi menuju sistem yang lebih demokratis, terbuka, dan partisipatif, sekaligus menegaskan pentingnya akses yang setara bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Pemilu merupakan wujud nyata demokrasi, di mana seluruh warga, termasuk tunanetra, berhak menentukan arah bangsa. Namun dalam praktiknya, hak politik penyandang disabilitas belum sepenuhnya terjamin. Hambatan utama terletak pada kualitas sosialisasi politik yang kurang inklusif. Sosialisasi tidak hanya soal waktu dan lokasi pemungutan suara, melainkan juga mencakup tata cara memilih, penggunaan alat bantu seperti template braille, serta penyediaan pendampingan netral. Ketiadaan informasi yang memadai memperburuk akses pemilih tunanetra untuk menyalurkan hak pilih secara mandiri dan rahasia.

Prinsip kesetaraan ini sejalan dengan pesan moral Al-Qur'an (Q.S. Abasa: 1-2) serta UU No. 19/2011 tentang ratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* yang menegaskan kewajiban negara menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas. Pada Pemilu serentak 14 Februari 2024, tercatat 65 pemilih tunanetra di Komplek Tunanetra, Kecamatan Ilir Timur III Palembang. Dari jumlah tersebut, 56 mengalami kebutaan total dan 9 low vision. Meski KPU telah menyediakan template braille untuk surat suara Presiden dan DPD, namun tidak tersedia bagi DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan dan mengindikasikan lemahnya pelaksanaan prinsip inklusivitas.

Minimnya sosialisasi adaptif membuat banyak pemilih tunanetra kesulitan memahami cara memilih dengan aman dan mandiri. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pemilu inklusif tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kualitas implementasi dan komunikasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis kualitas sosialisasi politik terhadap pemilih tunanetra pada Pemilu 2024 di Kota Palembang, dengan tujuan mengidentifikasi bentuk sosialisasi, menilai efektivitasnya, serta menemukan hambatan yang masih dihadapi.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari fenomena sosial dengan mempertahankan kondisi alaminya. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali makna yang dibentuk oleh individu berdasarkan pengalaman mereka, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai persoalan yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karena penelitian ini berfokus pada penyajian gambaran yang faktual, sistematis, dan akurat mengenai kualitas sosialisasi politik terhadap pemilih tunanetra dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai panduan agar proses analisis tetap sejalan dengan realitas di lapangan.

Data dalam penelitian ini merupakan representasi dari realitas sosial yang menjadi dasar utama analisis ilmiah. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif, peneliti mengumpulkan dua jenis data, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi lapangan serta wawancara mendalam dengan pemilih tunanetra di Komplek Tunanetra Kecamatan Ilir Timur III Palembang, serta pihak-pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berperan dalam sosialisasi pemilu. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur dan dokumen pendukung, meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan resmi, dan publikasi media daring yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, terutama saat berlangsungnya Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2024, guna melihat kondisi nyata yang dihadapi pemilih tunanetra. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, kendala, dan persepsi pemilih tunanetra serta pihak penyelenggara pemilu. Dokumentasi melengkapi proses ini melalui pencarian data dari literatur maupun pengumpulan bukti berupa foto, rekaman suara, atau dokumen yang relevan.

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi utama, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dan Komplek Tunanetra Kecamatan Ilir Timur III Palembang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga tahapan utama, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan sejak awal penelitian dengan cara memilah dan menyederhanakan informasi agar tetap relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah dianalisis dirangkum untuk memberikan gambaran utuh mengenai kualitas sosialisasi politik dan aksesibilitas pemilih tunanetra dalam Pemilu 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS KUALITAS SOSIALISASI POLITIK TERHADAP AKSESIBILITAS TUNANETRA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KOMPLEK TUNANETRA

Secara konseptual, sosialisasi politik dapat dianalisis melalui tiga aspek utama. Pertama, definisi dan konsep dasar sosialisasi politik, yang menekankan pada proses pengenalan serta pembentukan sikap politik masyarakat melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan institusi politik. Kedua, agen-agen sosialisasi politik sebagaimana dikemukakan oleh Dennis Kavanagh dan Kenneth P. Langton, yaitu keluarga, sekolah, kelompok sebaya, media massa, serta lembaga



politik. Dalam konteks penelitian ini, KPU Kota Palembang dikategorikan sebagai agen sosialisasi politik melalui kontak langsung, yang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi politik secara menyeluruh dan inklusif kepada pemilih, termasuk pemilih tunanetra. Ketiga, metode sosialisasi politik menurut Dawson dalam Haryanto (2009), yang terdiri dari imitasi, sosialisasi antisipatoris, pendidikan politik, dan pengalaman politik. Dari keempat metode tersebut, pendidikan politik menjadi metode yang paling relevan, karena menekankan pada penyampaian materi secara sistematis, adaptif, dan interaktif agar mampu meningkatkan pemahaman politik masyarakat.

Keterkaitan teori ini semakin jelas apabila dihubungkan dengan fungsi dan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki berbagai tugas strategis, di antaranya merencanakan program dan anggaran, menyusun tata kerja kelembagaan, mengoordinasikan tahapan pemilu, menerima dan memperbarui data pemilih, menyusun peraturan KPU, hingga menetapkan hasil rekapitulasi suara. Salah satu poin penting yang sangat relevan dengan penelitian ini adalah tugas KPU untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas serta wewenang KPU kepada masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa KPU tidak hanya berperan sebagai penyelenggara teknis pemilu, tetapi juga sebagai agen sosialisasi politik yang bertanggung jawab memastikan setiap warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh informasi yang memadai terkait proses pemilu.

Dengan melihat peran KPU tersebut, maka efektivitas sosialisasi yang mereka lakukan dapat dianalisis melalui perspektif sosialisasi politik: sejauh mana KPU berhasil menjalankan fungsi pendidikan politik, menggunakan metode yang sesuai, serta menjangkau kelompok rentan seperti pemilih tunanetra. Artinya, keberhasilan KPU dalam melaksanakan sosialisasi politik tidak hanya dilihat dari aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga dari kualitas informasi yang diterima oleh pemilih.

A. Sosialisasi Politik KPU Kota Palembang terhadap Masyarakat Umum

KPU Kota Palembang secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi politik yang menjangkau masyarakat luas, terutama kelompok pemilih pemula. Sosialisasi ini dilakukan melalui program kunjungan edukatif maupun keikutsertaan dalam acara yang digelar instansi lain. Salah satu contohnya adalah *Kunjungan Edukatif Sesi II* bertema “Sosialisasi Pemilih Pemula Anti Golongan Putih” yang dilaksanakan pada 7 September 2023 bersama siswa-siswi SMA IT Al-Furqon Palembang. Dalam kegiatan tersebut, KPU menekankan pentingnya menolak sikap golput serta mengajak generasi muda untuk memahami bahwa berpartisipasi dalam pemilu bukan sekadar formalitas, melainkan wujud tanggung jawab warga negara dalam menentukan arah kebijakan dan masa depan bangsa.

Kegiatan ini memiliki nilai edukatif yang cukup signifikan. Pertama, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dasar mengenai pemilu, tetapi juga diajak untuk bersikap kritis terhadap golput yang berpotensi melemahkan kualitas demokrasi. Kedua, sosialisasi menciptakan interaksi langsung antara KPU dengan calon pemilih, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima ketimbang melalui media. Ketiga, format kunjungan ke Kantor KPU memberi pengalaman khusus bagi peserta, karena mereka dapat melihat secara nyata lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu.

Selain di sekolah, KPU juga aktif menyampaikan sosialisasi di lingkungan perguruan tinggi, seperti di Universitas Taman Siswa Palembang dan STISIPOL Candradimuka. Dalam kesempatan tersebut, anggota KPU hadir sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang



pemilu dan pentingnya demokrasi. Kehadiran ini bertujuan membangun kesadaran politik mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda yang kelak ikut menentukan arah pembangunan bangsa. Hal serupa dilakukan pula di tingkat SMK, misalnya di SMK Negeri 2 Palembang dalam program *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)* bertema *Suara Demokrasi*, yang membekali siswa dengan pemahaman tentang peran pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, terlihat bahwa pemilih pemula dipilih sebagai sasaran utama karena mereka merupakan kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilih sehingga membutuhkan bimbingan serta pengetahuan mengenai proses pemilu. Harapannya, mereka tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi tumbuh sebagai pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Antusiasme siswa maupun mahasiswa dalam mengikuti kegiatan sosialisasi menunjukkan bahwa pendekatan KPU cukup efektif dalam menarik perhatian dan membangkitkan kesadaran pentingnya berpartisipasi. Kehadiran langsung KPU di sekolah dan kampus memberi nilai tambah, karena peserta bisa berdialog serta mengklarifikasi hal-hal yang belum mereka pahami terkait pemilu.

Meski demikian, efektivitas sosialisasi tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan atau penyampaian materi secara seremonial. Efektivitas sejati baru terlihat jika informasi benar-benar dipahami, diingat, dan diterapkan oleh peserta saat hari pemungutan suara tiba. Risiko muncul apabila sosialisasi hanya dilakukan sekali dan tidak berkelanjutan, apalagi di tengah derasnya arus informasi media sosial yang sering kali menyajikan hoaks. Oleh karena itu, kesinambungan program perlu diperkuat, misalnya melalui kerja sama jangka panjang dengan sekolah dan kampus, penyediaan materi digital yang mudah diakses, atau kegiatan simulasi pemilu berkala.

Dengan strategi semacam ini, pesan tentang pentingnya menggunakan hak pilih dan menolak golput dapat lebih tertanam pada generasi muda. Secara keseluruhan, sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Palembang dapat dinilai sebagai langkah positif sekaligus strategis dalam menumbuhkan kesadaran politik pemilih pemula. Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat ditentukan oleh konsistensi dan keberlanjutan program, agar generasi muda tidak hanya memahami arti penting pemilu, tetapi juga benar-benar hadir di bilik suara dan menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab.

B. Sosialisasi Politik KPU Kota Palembang terhadap Aksesibilitas Tunanetra

Sosialisasi politik merupakan strategi penting yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk memastikan seluruh warga negara memahami mekanisme dan prosedur pemilu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik. Dalam konteks Komplek Tunanetra Kota Palembang, peran KPU sebagai agen sosialisasi formal menjadi sangat vital untuk menghadirkan informasi yang inklusif, jelas, dan dapat diakses oleh pemilih tunanetra. Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa hak politik penyandang disabilitas dijamin dalam konstitusi dan harus diwujudkan secara nyata melalui penyelenggaraan pemilu yang adil dan setara.

Bagi KPU Kota Palembang, bentuk sosialisasi yang paling efektif adalah melalui simulasi pemungutan suara. Dalam kegiatan ini, pemilih tunanetra diperkenalkan secara langsung pada prosedur pemilu sebagaimana kondisi nyata di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka dibimbing melewati seluruh tahapan, mulai dari registrasi, mengantri, menunggu giliran, membuka surat suara, melakukan pencoblosan, hingga melipat dan memasukkan kembali surat suara ke kotak suara. Dengan cara ini, pemilih tunanetra tidak hanya memperoleh pengetahuan



teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang menumbuhkan rasa percaya diri dan kesiapan ketika hari pemungutan suara tiba.

Menurut keterangan salah satu anggota KPU Kota Palembang, kegiatan simulasi mendapat sambutan yang sangat antusias dari peserta. Antusiasme ini menunjukkan bahwa simulasi berhasil memberikan pengalaman nyata sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi. Peserta merasa lebih yakin dan siap untuk menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Bahkan, KPU melengkapi sosialisasi ini dengan video panduan yang dibagikan kepada seluruh petugas KPPS agar mereka memiliki pemahaman yang seragam mengenai tata cara pelayanan pemilih disabilitas. Media visual ini dimaksudkan untuk memastikan setiap petugas dapat memberikan pelayanan sesuai dengan regulasi serta mengutamakan prinsip kesetaraan.

Meski demikian, KPU menyadari bahwa tantangan terbesar bagi pemilih tunanetra tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga psikologis. Sebagian dari mereka kerap merasa khawatir dan kurang percaya diri untuk hadir di TPS. Untuk menjawab persoalan ini, KPU berupaya menciptakan rasa aman melalui pendampingan langsung. Petugas diarahkan untuk memberikan bantuan sejak proses menuju TPS hingga tahap pencoblosan, tanpa melanggar prinsip kerahasiaan suara. Dengan jaminan pendampingan tersebut, pemilih tunanetra diharapkan dapat lebih termotivasi untuk datang ke TPS dan menyalurkan aspirasinya.

Selain pendampingan, KPU juga menerapkan kebijakan pelayanan prioritas di TPS bagi pemilih disabilitas. Mereka tidak diwajibkan mengantri sebagaimana pemilih umum, melainkan diarahkan langsung menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Langkah ini mempermudah proses pemungutan suara sekaligus menegaskan komitmen KPU dalam mewujudkan pemilu yang ramah disabilitas. Bagi pemilih tunanetra, kebijakan ini tidak hanya menghadirkan kenyamanan praktis, tetapi juga memberikan pengalaman demokrasi yang inklusif dan setara.

Aspek aksesibilitas pun mendapat perhatian khusus. KPU menyiapkan template braille untuk membantu pemilih tunanetra mencoblos surat suara secara mandiri. Kehadiran alat bantu ini memperlihatkan keseriusan KPU dalam menjaga kerahasiaan pilihan politik tunanetra sekaligus menjamin mereka tetap memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan. Petugas KPPS juga dibekali arahan khusus agar mampu memberikan pendampingan tanpa mengurangi esensi kemandirian tersebut.

Dari berbagai strategi ini, terlihat bahwa sosialisasi politik yang dilakukan KPU Kota Palembang tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada penciptaan pengalaman demokrasi yang nyata bagi pemilih tunanetra. Mereka tidak dipandang sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlakuan setara. Antusiasme yang ditunjukkan dalam setiap kegiatan sosialisasi mencerminkan keberhasilan KPU dalam menanamkan rasa percaya diri sekaligus memperkuat kesadaran politik kelompok disabilitas.

Jika ditinjau dari perspektif teori sosialisasi politik Michael Rush, Philip Althoff, serta Dennis Kavanagh dan Kenneth Langton, peran KPU dapat dipahami sebagai agen sosialisasi yang tidak hanya mentransmisikan informasi teknis, tetapi juga menanamkan nilai fundamental tentang kesetaraan politik. Dengan demikian, upaya sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Palembang menjadi bagian penting dari proses demokratisasi inklusif, yang memastikan bahwa pemilu 2024 tidak hanya berjalan prosedural, tetapi juga substantif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.



C. Proses Aksesibilitas Yang Dijalani Pemilih Tunanetra Dalam Menyalurkan Hak Suara Di Komplek Tunanetra

Setelah menelaah bentuk sosialisasi politik yang dilakukan KPU Kota Palembang kepada pemilih tunanetra, penelitian ini melanjutkan kajian pada implementasi nyata saat Pemilu 2024 berlangsung. Penting untuk diperhatikan bahwa apa yang disampaikan dalam proses sosialisasi tidak selalu terealisasi sepenuhnya di lapangan, baik karena keterbatasan sumber daya, faktor teknis, maupun dinamika sosial yang muncul pada hari pemungutan suara. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga menggali pengalaman empiris pemilih tunanetra di Komplek Tunanetra Kota Palembang.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa aksesibilitas bagi pemilih tunanetra tidak hanya berkaitan dengan fasilitas fisik seperti template braille atau bantuan petugas, tetapi juga menyangkut akses informasi dan pemahaman kognitif tentang prosedur pemilu. Menariknya, sebagian besar informasi yang diterima pemilih tunanetra tidak diperoleh langsung dari KPU, melainkan melalui jalur informal, seperti Ketua RT, komunitas sekitar, maupun keluarga. Beberapa warga menuturkan bahwa mereka mengetahui jadwal pencoblosan dari arahan Ketua RT, sementara yang lain mengandalkan pesan singkat dari grup WhatsApp, televisi, atau bantuan anggota keluarga. Pola ini memperlihatkan bahwa agen sosialisasi informal justru lebih dominan daripada KPU sebagai penyelenggara resmi.

Temuan lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan ketersediaan template braille. Dalam sosialisasi, KPU menyampaikan bahwa seluruh surat suara akan dilengkapi dengan alat bantu tersebut. Namun, pada praktiknya template hanya tersedia untuk pemilihan presiden dan DPD, sedangkan untuk DPRD provinsi maupun kabupaten/kota tidak tersedia. Akibatnya, pemilih tunanetra terpaksa meminta pendampingan keluarga atau petugas ketika melakukan pencoblosan. Kondisi ini jelas mengurangi asas kerahasiaan suara dan menimbulkan potensi intervensi pihak lain. Beberapa informan bahkan mengakui bahwa mereka merasa kurang percaya diri tanpa pendamping, meskipun sebenarnya ingin menggunakan hak pilih secara mandiri.

Dari aspek mobilitas, sebagian pemilih mengaku bahwa lokasi TPS relatif dekat dari tempat tinggal mereka. Namun, perjalanan menuju TPS tetap menyulitkan karena kondisi jalan yang tidak ramah disabilitas, seperti permukaan yang tidak rata dan ketiadaan penanda khusus. Hal ini membuat mereka harus sangat berhati-hati atau bahkan bergantung pada orang lain agar bisa sampai ke TPS dengan aman. Salah satu usulan yang muncul dari warga adalah penyediaan jalur penanda sederhana, seperti tali pembatas, agar mereka memiliki panduan ketika berjalan menuju TPS.

Dari sisi pelayanan petugas KPPS, respon pemilih tunanetra umumnya positif. Mereka menilai petugas cukup ramah, bersedia membantu, dan memberikan arahan selama proses pemungutan suara. Meski demikian, ada catatan bahwa cara komunikasi petugas belum sepenuhnya efektif. Beberapa instruksi disampaikan dengan tergesa-gesa sehingga sulit dipahami pemilih tunanetra. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KPPS telah mendapatkan bimbingan teknis, keterampilan komunikasi praktis di lapangan masih menjadi tantangan tersendiri.

Selain itu, organisasi penyandang disabilitas seperti PERTUNI sebenarnya berpotensi besar menjadi jembatan antara KPU dan pemilih tunanetra. Namun, aktivitas mereka dalam mendukung pemilu masih terbatas. Pelatihan khusus terkait pemilu belum rutin dilakukan, dan mekanisme pengumpulan aspirasi anggota pun belum berjalan sistematis. Akibatnya, sebagian



besar anggota lebih banyak bertukar informasi melalui percakapan informal atau media sosial, bukan melalui forum resmi. Dari semua temuan ini, tampak bahwa meskipun KPU telah berupaya melakukan sosialisasi dan menyediakan fasilitas, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai keterbatasan. Mulai dari keterbatasan ketersediaan template braille, akses jalan yang belum ramah, hingga komunikasi petugas yang belum sepenuhnya efektif. Di sisi lain, kehadiran agen informal seperti keluarga, Ketua RT, maupun komunitas ternyata sangat menentukan dalam menjembatani pemilih tunanetra untuk tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Namun, ketergantungan pada jalur informal ini sekaligus menegaskan masih adanya kesenjangan akses informasi politik yang inklusif.

KESIMPULAN

Analisis kualitas sosialisasi politik terhadap aksesibilitas pemilih tunanetra pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2024 di Komplek Tunanetra Palembang menunjukkan bahwa upaya KPU Kota Palembang sudah mengarah pada pemilu inklusif, namun masih menghadapi sejumlah keterbatasan.

Pertama, dari sisi **sosialisasi**, KPU telah melakukan berbagai program seperti simulasi pemungutan suara dan penyediaan media edukatif. Metode ini efektif dalam menumbuhkan kepercayaan diri pemilih tunanetra sekaligus memberi pengalaman langsung tentang proses pemilu. Akan tetapi, distribusi informasi adaptif masih belum merata. Banyak pemilih tunanetra justru memperoleh informasi dari jalur informal, seperti Ketua RT, keluarga, atau komunitas, yang menunjukkan belum optimalnya peran KPU sebagai agen sosialisasi formal.

Kedua, dari aspek **aksesibilitas teknis**, penyediaan template braille hanya mencakup surat suara Presiden dan DPD, sementara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota tidak tersedia. Kondisi ini mengurangi asas kesetaraan dan kerahasiaan suara, karena sebagian pemilih tunanetra terpaksa meminta pendampingan. Selain itu, faktor mobilitas menuju TPS juga menjadi hambatan, mengingat kondisi infrastruktur jalan belum ramah disabilitas.

Ketiga, dari segi **pelayanan petugas**, sikap ramah dan responsif KPPS diapresiasi pemilih tunanetra. Namun, keterampilan komunikasi masih menjadi tantangan, karena sebagian instruksi disampaikan tergesa-gesa dan sulit dipahami. Hal ini memperlihatkan perlunya pelatihan lanjutan agar petugas mampu memberikan pendampingan secara efektif tanpa mengurangi kemandirian pemilih.

Keempat, **peran organisasi penyandang disabilitas** seperti PERTUNI masih terbatas, sehingga dukungan advokasi dan edukasi berkelanjutan belum maksimal. Padahal, organisasi ini berpotensi menjadi jembatan strategis antara KPU dan komunitas tunanetra.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kualitas sosialisasi politik KPU Kota Palembang terhadap pemilih tunanetra sudah menunjukkan komitmen inklusivitas, tetapi efektivitasnya masih parsial. Pemilu 2024 di Komplek Tunanetra memperlihatkan bahwa inklusi politik tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga menuntut konsistensi pelaksanaan sosialisasi adaptif, ketersediaan fasilitas yang setara, serta penguatan peran aktor nonformal dan organisasi disabilitas. Oleh karena itu, keberlanjutan program sosialisasi, peningkatan sarana aksesibilitas, dan penguatan kolaborasi multipihak menjadi kunci untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas tunanetra.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali, & Banjarmasin, A. (2018). Analisis Data Kualitatif (Vol.17, Issue 33).
- Al Ichsan, F., & Fadlia, F. (2018). Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas (Studi Kasus: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 di Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(3).
- Aminah, S, Roikan.2019. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik. Jakarta: Prenadamedia Group
- Amit, "Penggunaan Tongkat Pada Peserta Didik Tunanetra SMALB Dalam Melakukan Mobilitas," Universitas Pendidikan Indonesia, p. 5, 2018.
- Arifin, M. R. (2023). Pemenuhan Partisipasi Pemilih dan Hak Kelompok Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden 2019 di Kota Jakarta Selatan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(04), 281-290.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329–348.
- Asgar, S. (2023). Partisipasi politik masyarakat pada Pemilu dan Pilkada sebagai dasar legitimasi kekuasaan pemerintah. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(3), 5982–5994.
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29- 41.
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41>
- Azmi Nidaurrahmah. (2018). PRINSIP KEADILAN DALAM ONE MAN ONE VOTE.
- Azzahra Alya Fatimah. Efforts to Equitable Education for Children with Intellectual Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children, *Journal of Creativity Student* 2020, Vol. 5(1) 65-86 © The Author(s) 2020 DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493
- Budianto, K. (2017). Kelembagaan Politik Islam: Konsep Konstitusi, Legislasi, Demokrasi, Ummah Dan Syura'. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 1(2), 155-166.
- Dwintari, J. W. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 29-51.
- Fransiska, I. (2021). Pemberdayaan sosial penyandang disabilitas netra dalam pekerjaan melalui pelatihan pijat massage di BRSPDSN Wyata Guna Bandung. *Comm-Edu(Community Education Journal)*, 4(2), 57–62.
- Hidayat, R. N. PEMANFAATAN ALAT BANTU COBLOS BAGI TUNANETRA DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 DI JAKARTA SELATAN (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Maulana, M. S., Nugroho, K. S., & Indriyany, I. A. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Difabel Daksa Dan Netra Dalam Pemilihan Gubernur Banten Tahun 2017 (Studi Kasus Pemilih Difabel di Kota Tangerang) (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Maulia Pangestu Putri, Triyanto Triyanto, Rima Vien Permata Hartanto. (2019). PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA SAAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN WONOGIRI. *PKn Progresif : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan* Vol.14, No 2



- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Nurinzani, H. (2022). AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENYALURKAN HAK POLITIK DI KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- Pahlevic S.R, Novitasari i.A, Hariani S.S, Azmi Syarifatul A.N, Siswoyo A.A. IDENTIFIKASI PENDIDIKAN DAN LAYANAN KHUSUS BAGI ANAK TUNANETRA DI SLB NEGERI KELEYAN BANGKALAN, JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA) Vol.2, No.6 Juni 2024 e-ISSN:3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX PT. Media Akademik Publisher AHU 084213.AH.01.30.Tahun 2023
- Prajalani, Yuniviana Nur Hari, Himawanto, Dwi Aries. Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri Sukoharjo. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*. 2017: Vol. 04(02): PP 87 - 95.
- Rahmayani, E. (2023). Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020. *Indonesian Journal of Political Studies*, 3(2), 68-89.
- Rengganis, V. M. S., Sidiki, H. I., Saputra, F., & Damarjati, W. (2021). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 116-137.
- Rosalina, T. A., & Apsari, N. C. (2020). Dukungan sosial bagi orang dengan disabilitas netra dalam pencapaian prestasi di Sekolah Luar Biasa. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 414-424.
- Silitonga T, Purba Y, Munthe H, Herlina E.S. KARAKTERISTIK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu> Vol. 2, No. 3 Tahun 2023 P-ISSN: 2964-7142; E-ISSN: 2964-6499
- Sinaga, S. A. (2023). Studi Analisis Kesetaraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas pada QS An-Nur 61 dan QS Abasa 1-3 dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir. *ANWARUL*, 3(5), 981993. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i5.1440>
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Baegaqi Arif, D. (2012). *BAHAN AJAR*. Surbakti, R. (2018). *Memahami Ilmu Politik* (hlm. 149). Jakarta: PT Grasindo.
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. *Inklusi: Journal of Disability Studies*, 1(2), 269-289
- Syaifurrohman, S., & Erowati, D. (2020). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 4(2), 118-130.